

**KEGAGALAN PERJUANGAN POLITIK REKOGNISI IKATAN
TUNANETRA MUSLIM INDONESIA DI KABUPATEN SERANG**

**THE FAILURE OF THE POLITICAL STRUGGLE FOR RECOGNITION OF
INDONESIAN MUSLIM BLIND PEOPLE IN SERANG DISTRICT**

Silvia Dwi Adinda ^a, Firyal Fazriani ^b, Bunga Cahya Faqih ^c, Galih Pramudya ^d
Mahpudin ^e

- ^a Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: silviadwiananda09@gmail.com
- ^b Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: firyalFazriani@gmail.com
- ^c Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: bungaacahyaafaqih@gmail.com
- ^d Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: galihpramudya001@gmail.com
- ^e Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
email: mahpudin.ip@untirta.ac.id

Abstract

Problem: The Indonesian Muslim Blind Association (ITNMI) is a community organization that brings together members of the visually impaired or blind Muslims in Serang district. This organization has been established since 2021 and is experiencing challenges due to the lack of recognition and support they should receive. They are labeled as a group that cannot live independently and is unproductive. On this basis, they struggle to be recognized by the state and society that they have the same abilities as other normal humans.

Purpose: This article attempts to explain the forms and factors behind ITMI Serang Regency's failure to recognize ITMI in fighting for its recognition rights from the government and the social environment.

Methodology: This research uses a qualitative case study method with interview, observation, and documentation data collection techniques.

Results/ Findings: The research results show that the recognition struggle carried out by the Serang Regency ITMI Organization experienced failure or misrecognition. The factors that cause this to happen are internal, external, and economic factors. And there is mobilization based on personal interests which destroys the integral dignity of humanity and makes ITMI Serang Regency inactive again (mis-existence).

Keywords: Recognition; Disability; Minority Struggle.

*Corresponding Author

email: mahpudin.ip@untirta.ac.id

Abstrak

Masalah: Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITNMI) adalah organisasi masyarakat yang menghimpun anggota penyandang disabilitas gangguan pada penglihatan atau tunanetra beragama muslim di kabupaten Serang. Organisasi ini telah berdiri sejak 2021 dan mengalami tantangan atas tidak adanya rekognisi dan dukungan yang seharusnya mereka dapatkan. Mereka dicap sebagai kelompok yang tidak bisa hidup mandiri dan tidak produktif. Atas dasar hal itu, mereka melakukan perjuangan agar dapat diakui oleh negara maupun sosial bahwa mereka memiliki kemampuan sama seperti manusia normal lainnya.

Tujuan: Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana bentuk serta faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan rekognisi ITMI Kabupaten Serang dalam memperjuangkan hak-hak pengakuannya dari pemerintah dan lingkungan sosial.

Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Temuan/Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan Rekognisi yang dilakukan oleh Organisasi ITMI Kabupaten Serang mengalami kegagalan atau mis-rekognisi. Faktor yang menyebabkan hal itu bisa terjadi adalah dikarenakan faktor internal, eksternal dan ekonomis. Serta adanya mobilitas berlandaskan kepentingan pribadi yang menghancurkan harkat integral kemanusiaan dan membuat ITMI Kabupaten Serang menjadi tidak aktif kembali (mis-eksistensi).

Kata kunci Rekognisi; Difabel; Perjuangan Minoritas.

A. PENDAHULUAN

Disabilitas adalah keadaan terbatas yang dialami seorang individu secara fisik, mental, sensorik dan kecerdasan. Keterbatasan yang dimiliki oleh kelompok disabilitas kerap dikarenakan oleh kecelakaan ataupun kelainan yang dibawa sejak lahir. Menurut WHO Disabilitas atau difabel adalah kondisi seseorang yang memiliki kelainan tubuh atau mental yang menyebabkan mereka mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Keterbatasan ini dapat berupa ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas secara mandiri, membutuhkan bantuan orang lain, atau membutuhkan alat bantu. Keadaan tersebut berdampak terhadap aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial seseorang yang mengalami hal ini. Keterbatasan yang disandang oleh kelompok disabilitas

menimbulkan pandangan sebelah mata yang ditujukan untuk mereka atas dasar ketidakmampuan serta kelemahan mereka dalam melakukan aktivitas dan berpikir layaknya insan manusia pada umumnya, hal itu pula yang seolah dijadikan sebuah legitimasi untuk melakukan diskriminasi bahkan tindak kekerasan kepada kelompok disabilitas. Kontruksi sosial cenderung bersifat tidak bisa menerima seseorang dengan perbedaan kondisi fisik yang menyebabkan kelompok disabilitas kerap mendapatkan stigma negatif dan perlakuan tidak adil dalam sosial (esmenanda,2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, jumlah disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta orang, kemudian di tahun 2022 berdasarkan data milik Kemenko PMK terdapat 22,97 juta orang. yang paling banyak di

Indonesia adalah gangguan penglihatan (Bappenas, 2021).

Meninjau data dari BPS di tahun 2022 kategori disabilitas sama sekali tidak bisa melihat di wilayah perkotaan pada pria menunjukkan angka 81,668 dan perempuan 85,598. Kemudian beralih pada wilayah pedesaan, kaum pria dengan kategori ini berada di angka 49,250 dan 56,352 pada perempuan.

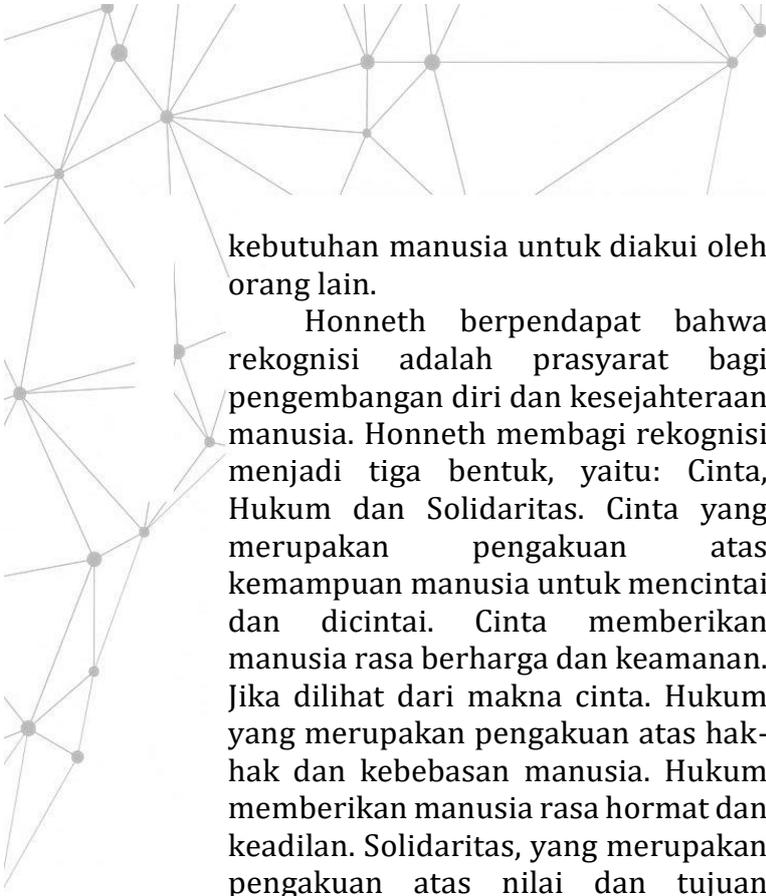
Gangguan penglihatan atau Tunanetra merupakan jenis disabilitas sensorik, penyandang disabilitas ini memiliki gangguan pada penglihatannya. Tunanetra berasal dari gabungan kata "tuna" yang merujuk pada rugi atau rusak, dan "netra" yang mengacu pada mata. Dengan demikian, tunanetra merujuk pada individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Mohammad Efendi memberikan definisi tunanetra sebagai kondisi penglihatan di mana "Seorang anak dianggap mengalami tunanetra jika visus sentralisnya, setelah dikoreksi secara maksimal, kurang dari 6/60, sehingga ia tidak dapat lagi menggunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang umumnya digunakan oleh anak normal atau orang yang memiliki kemampuan penglihatan yang baik."

Dari perspektif medis, seseorang dianggap mengalami tunanetra jika "memiliki visus dua puluh per dua ratus atau kurang dan memiliki lintang pandangan kurang dari 20°". Gangguan penglihatan atau Tunanetra merupakan jenis disabilitas sensorik, penyandang disabilitas ini memiliki gangguan pada penglihatannya. Kondisi tunanetra sendiri memiliki perbedaan, terdapat tunanetra yang masih mampu untuk melihat meskipun sebagian, terdapat juga

tunanetra yang secara keseluruhan tidak mampu untuk melihat. Di Indonesia terdapat sebuah organisasi yang didirikan oleh penyandang tunanetra dengan berlandaskan pada identitas keagamaan dan nilai-nilai Islam di dalamnya, organisasi ini adalah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI).

Organisasi ini tersebar di tingkat pusat serta daerah, salah satu daerah yang menjadi tempat berkembang bagi ITMI adalah Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Serang. ITMI bergerak dalam bidang keagamaan Islam dengan 4 menghimpun sesama penyandang tunanetra dan sesama muslim, kegiatan-kegiatan mereka seperti berdakwah, melakukan pengajian rutin, membaca Al-Qur'an dan belajar menulis braille sebagai bentuk pengembangan potensi diri, dan produktivitas anggotanya. Kegiatan sosial yang mereka lakukan adalah sebuah upaya untuk menciptakan kemandirian sekaligus mendapatkan pengakuan bagi mereka selaku penyandang disabilitas tunanetra yang terpinggirkan dari tatanan sosial, yakni meskipun memiliki keterbatasan bukan berarti mereka tidak dapat berkembang dan memiliki kemandirian.

ITMI di Kabupaten Serang menginginkan pengakuan khususnya dari pemerintah, Namun ITMI di Kabupaten Serang tidak berjalan sebagai mana mestinya, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya adalah: adanya oknum yang tidak bertanggung jawab, hal ini yang membuat ITMI di Kabupaten Serang hilang begitu saja tanpa adanya pengakuan dari Pemerintah. Teori rekognisi menurut Axel Honneth adalah teori moral yang berfokus pada



kebutuhan manusia untuk diakui oleh orang lain.

Honneth berpendapat bahwa rekognisi adalah prasyarat bagi pengembangan diri dan kesejahteraan manusia. Honneth membagi rekognisi menjadi tiga bentuk, yaitu: Cinta, Hukum dan Solidaritas. Cinta yang merupakan pengakuan atas kemampuan manusia untuk mencintai dan dicintai. Cinta memberikan manusia rasa berharga dan keamanan. Jika dilihat dari makna cinta. Hukum yang merupakan pengakuan atas hak-hak dan kebebasan manusia. Hukum memberikan manusia rasa hormat dan keadilan. Solidaritas, yang merupakan pengakuan atas nilai dan tujuan bersama. Solidaritas memberikan manusia rasa kebersamaan dan tujuan hidup.

Menurut Honneth, ketiga bentuk rekognisi tersebut saling berkaitan dan saling memperkuat, orang-orang yang tergabung dalam ITMI mempunyai kemampuan yang lebih dan ada tekad ingin mengembangkan kemampuannya untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri tersebut yang kemudian akan memudahkan ITMI untuk menuntut hak-hak dan kebebasannya dalam hukum, dan ketika hak-hak dan kebebasannya diakui hukum, ITMI akan merasa lebih dihargai dan dihormati keberadaannya baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Ketiga bentuk rekognisi tersebut saling berhubungan satu sama lain. Jika tidak terdapat relasi diantara ketiga ranah tersebut hal yang akan terjadi adalah kegagalan dalam pengakuan (misrekognisi).

Seperti Ikatan Tunanetra Muslim (ITMI) yang ada di Kabupaten Serang, Banten yang memperjuangkan pengakuan melalui kemampuan lebih

yang dimiliki oleh para anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, seperti melakukan message, membaca dan menulis Al-Qur`an braile, serta mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Qur`an, akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil karena ITMI Serang masih kurang pengakuan baik dari pemerintah maupun dari Masyarakat, hal inilah yang membuat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia mitra Serang dapat dikatakan gagal dalam memperjuangkan pengakuan. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor faktor yang membuat kegagalan dalam pengakuan ITMI cabang Serang.

B. TINJAUAN TEORI

Rekognisi

Dalam konteks bahasa, "rekognisi" pada kata yang mendasar dalam bahasa Inggris yang memiliki makna "recognition," berarti persetujuan bahwa sesuatu benar atau sah secara hukum. Sementara dalam bahasa Jerman, memakai kata "anerkennung" berasal dari kata kerja "anerkennen," yang artinya mengenal atau mengakui (to recognize). Kata pokok "anerkennen" adalah "erkennen," yang memiliki dasar terkecil yaitu "kennen," yang artinya mengenal atau mengetahui (to know atau to be acquainted with).

Maka dari itu, kata "recognition" memiliki kaitan dengan unsur pengenalan, Pengakuan dan pengetahuan. Definisi ini secara khusus menunjukkan bahwa pengakuan bersifat relasional setara bersifat legal. Hal ini membimbing kita dalam memahami bahwa membahas pengakuan artinya membicarakan hubungan antar aktor yang pola

hubungannya muncul dari penerimaan terhadap eksistensi tersebut.

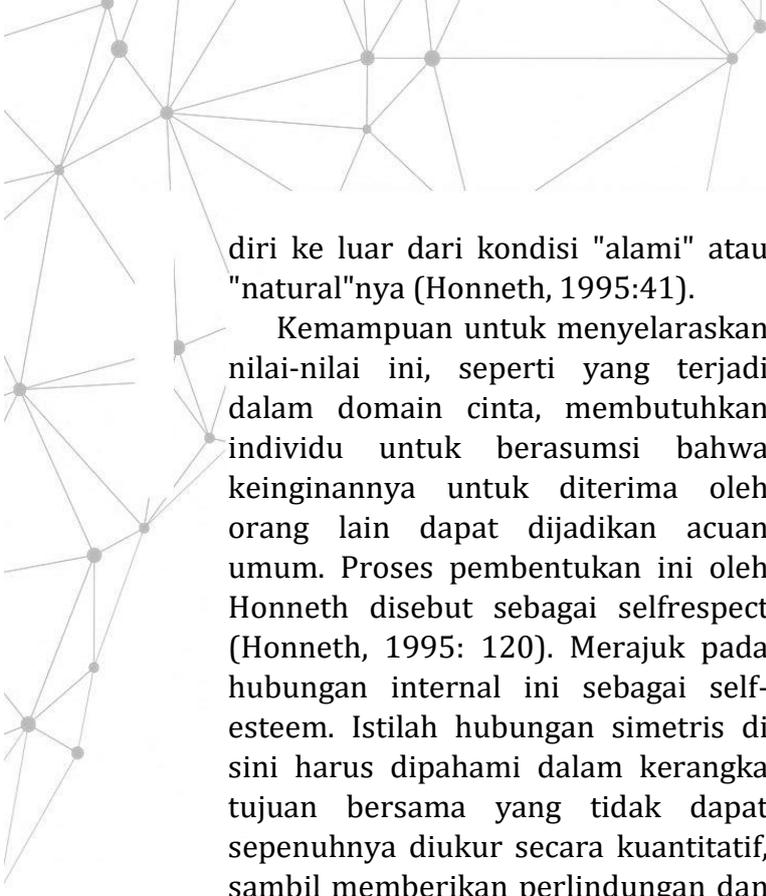
Dengan pemahaman bahasa ini, menjadi kunci penting dalam meresapi konsep rekognisi dalam pemikiran Honneth. Ia menyatakan bahwa rekognisi bersifat resiprokal, bukan sekadar sentimen moral tertentu, melainkan melibatkan saling pengenalan antara satu dengan yang lainnya (Agus Miswanto 2022). Axel Honnet mengatakan ada tiga ranah pada pembentukan diri antara lain self-confidence, self-respect dan self-esteem. Honneth (1995: 25) kemudian mengelompokkan mode dan objek dari pengakuan yang melibatkan afeksi-individu di ranah keluarga (cinta), kognisi-person di ranah masyarakat sipil (hukum/hak), dan afeksi yang telah diubah menjadi rasional dan subjek individu partikular di ranah negara (solidaritas).

Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengakuan? Menurut Honneth, pengakuan adalah tindakan kognitif yang sadar terhadap ancaman dari orang lain sehingga mampu mengidentifikasi orang lain sebagai bagian integral dari dirinya secara keseluruhan. Axel Honneth mengembangkan teori yang mengulas hubungan antara rekognisi dan redistribusi. Ia memperkenalkan pendekatan alternatif yang dikenal sebagai "monisme normatif" mengenai rekognisi, berbeda dengan "dualisme perspektif" yang diperkenalkan oleh Fraser, yang menggabungkan redistribusi dan pengakuan. Dalam pandangan Honneth, teori rekognisi menjadi dasar untuk keadilan dalam masyarakat. Menurutnya, ketika teori rekognisi dipahami secara mendalam,

redistribusi sebenarnya sudah terintegrasi dalam struktur dasar teori rekognisi.

Menurut pandangan Honneth, konsep pengakuan mencakup aspek yang berbeda, melibatkan baik "pengakuan hak" maupun "penghargaan budaya," bersama dengan klaim terhadap "cinta." Teori rekognisi Honneth membentuk dasar normatif untuk perjuangan sosial dan pengakuan dalam rangka menghilangkan segala bentuk ketidakhormatan (disrespect). Teori ini termanifestasi dalam tiga ranah: cinta, hukum, dan solidaritas. Hubungan timbal balik di antara ketiga ranah ini menciptakan dasar bagi self-confidence, self-respect, dan self-esteem yang mendasar.

Menyimpulkan dari teori Honneth ini, Pemenuhan aspek hukum sendiri tidak akan menjadi cukup, sebab keterkaitannya dengan politik pengakuan di bidang lain. Oleh karena itu, koneksi saling antara ketiga ranah tersebut menjadi penting. Jika tidak ada relasi mutual di antara ketiga ranah tersebut, konsekuensinya akan berdampak pada miskonsepsi atau 6 ketidakakuratan pengakuan. Setiap tahapan, baik itu cinta, hukum, atau solidaritas, memiliki elemen ketidaknyamanan yang Honneth sebut sebagai "disrespect". Berikut penjelasannya Cinta merupakan langkah awal dalam pembentukan identitas secara timbal balik, yang tanpanya seseorang akan mengalami kesulitan dalam memahami orang lain. Fokus tahap ini adalah membentuk rasa keyakinan diri (self-confidence), sebagai landasan untuk mengarahkan



diri ke luar dari kondisi "alami" atau "natural"nya (Honneth, 1995:41).

Kemampuan untuk menyelaraskan nilai-nilai ini, seperti yang terjadi dalam domain cinta, membutuhkan individu untuk berasumsi bahwa keinginannya untuk diterima oleh orang lain dapat dijadikan acuan umum. Proses pembentukan ini oleh Honneth disebut sebagai selfrespect (Honneth, 1995: 120). Merujuk pada hubungan internal ini sebagai self-esteem. Istilah hubungan simetris di sini harus dipahami dalam kerangka tujuan bersama yang tidak dapat sepenuhnya diukur secara kuantitatif, sambil memberikan perlindungan dan pengakuan pada setiap individu (Honneth, 1995: 128-130).

Studi tentang difabel telah banyak dilakukan, misalnya penelitian Fadhilah (2018) menyebutkan faktor yang dapat mempengaruhi *psychological well being* pada muslim penyandang netra adalah faktor internal dan eksternal. Internal yaitu gender, umur, akibat terjadinya kecacatan, dan tingkat religius. Eksternal yaitu dukungan sosial. Prabowo (2019) menyatakan bahwa jaminan hukum tidak dapat sepenuhnya memenuhi aspek rekognisi karena hukum memiliki hubungan kuat dengan politik rekognisi yang lain. Sehingga, politik rekognisi perlu dilihat melalui aspek yang lebih berani. Sementara Idrus (2022) memandang perlunya inklusi sebagai jaminan bagi disabilitas dalam hal pemenuhan partisipasi, sehingga dalam hal ini masyarakat perlu memberikan dukungan nyata terhadap melalui pendekatan terhadap kalangan disabilitas.

Dari studi tersebut nampak bahwa pentingnya rekognisi terhadap sebuah kelompok sebagai prasyarat bagi teralisasinya hak dan kesetaraan. Sebagaimana Lestari (2022) menyatakan bahwa ketiadaan rekognisi menyebabkan terjadinya konflik berbasis agama yang diperumit karena ketidakberpihakan kebijakan terhadap kelompok minoritas. Sementara Nasution (2022) memotret bagaimana rekognisi direalisasikan pada ranah pendidikan untuk internalisasi nilai-nilai kesetaraan dan hak asasi kepada siswa dalam konteks perlindungan anak. Senada dengan itu, Humaidi (2022) menekankan pentingnya rekognisi dari negara terhadap penghayat kepercayaan sebab mereka bagian dari warganegara.

Studi yang kami lakukan berusaha memotret bagaimana praktik dan perjuangan rekognisi oleh kelompok minoritas difabel netra dalam memperjuangkan hak asasi, kesetaraan, dan keadilan baik dalam konteks relasi sosial maupun dalam berhubungan dengan negara (dalam hal ini pemerintahan daerah). Menggunakan konsep rekognisi dari Axel Honnet, penelitian ini berusaha mengungkap sejauh mana atau pada level mana, rekognisi berkelindan terhadap eksistensi kelompok difabel muslim tuna netra di Kabupaten Serang.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus, metode kualitatif digunakan untuk mengamati objek penelitian atau interaksi sosial yang terjadi secara ilmiah tanpa ada campur

tangan dari peneliti (natural setting), studi kasus digunakan untuk membantu dan memudahkan peneliti dalam mencari data dan memahami kondisi yang terjadi di lapangan, data yang akan diperoleh merupakan hasil dari studi lapangan dan studi pustaka yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Selain itu, untuk memperkuat fakta dan membantu memahami situasi secara keseluruhan, peneliti juga mengumpulkan data dari referensi, publikasi ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, artinya penelitian berfokus pada informan yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dan relevansi masalah penelitian, serta mereka dianggap mampu dalam membantu menjawab masalah penelitian, (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, data dapat diperoleh melalui berbagai sumber primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan sosial yang sedang diteliti, wawancara pada penelitian ini ditujukan agar peneliti dapat memperoleh informasi lebih banyak dan menggunakan dokumentasi sebagai pelengkap data. Data yang diperoleh oleh peneliti telah dipertimbangkan keabsahannya dengan melakukan triangulasi data. Pengecekan fakta dengan melakukan wawancara dari pihak lain juga dilakukan agar data yang digunakan dapat dipertanggung jawabkan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan alur analisis data yang dilakukan pada waktu

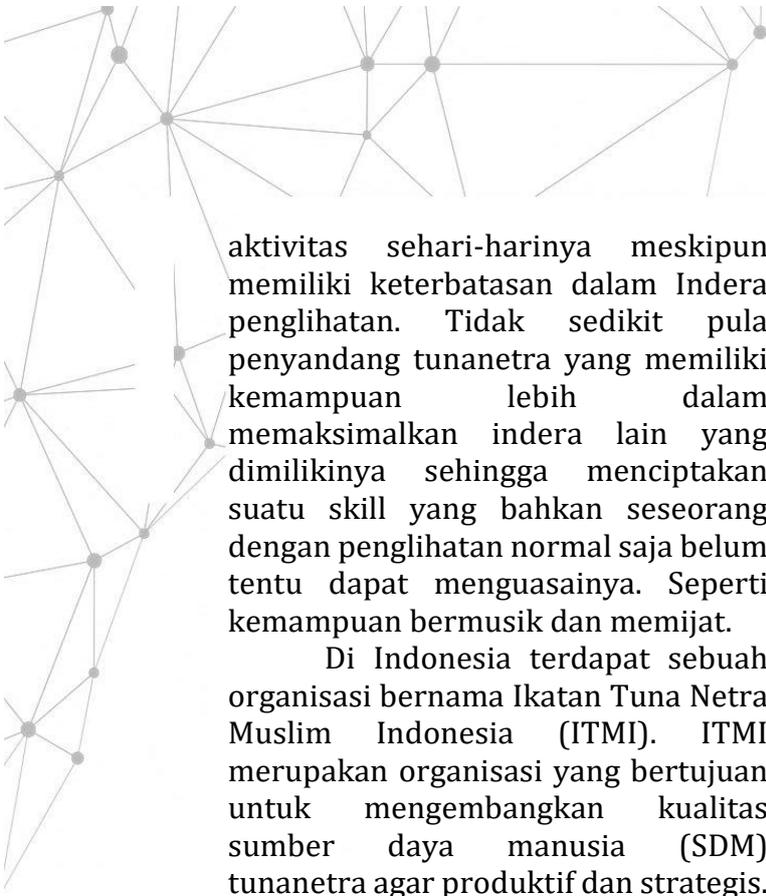
yang sama yaitu reduksi data, pengajian data, dan membuat kesimpulan. Triangulasi data merupakan validasi data yang didapat dari berbagai sumber, baik tulisan atau angka yang menggunakan berbagai cara dan waktu berbeda, Triangulasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu verifikasi ulang data yang diperoleh dari beberapa sumber, dengan mempertimbangkan waktu yang kita miliki sebagai peneliti.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Garis Besar ITMI

World Health Organization (WHO) mendefinisikan disabilitas sebagai keadaan dimana seseorang memiliki keterbatasan kemampuan dalam menjalankan aktivitas dalam batas-batas yang dianggap normal. Terdapat tiga kategori disabilitas menurut WHO, antara lain yaitu impairment yang merupakan kondisi tidaknormalan, lenyapnya fungsi psikologis atau anatomis, hingga hilangnya struktur. Kedua yaitu keterbatasan yang merupakan dampak dari adanya impairment dalam menjalankan aktivitas sehari-hari yang dikategorikan manusia sebagai batas normal. Ketiga yaitu handicap dimana sebuah keadaan merugikan tercipta karena adanya impairment.

Salah salah satu keadaan disabilitas adalah tunanetra Tunanetra merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seorang individu yang memiliki kelainan atau gangguan pada indera penglihatan baik secara keseluruhan (totally blind) atau kurang penglihatan (low vision). Seseorang dengan kondisi tunanetra pada umumnya akan mengandalkan indera peraba dan pendengaran dalam memaksimalkan



aktivitas sehari-harinya meskipun memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan. Tidak sedikit pula penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan lebih dalam memaksimalkan indera lain yang dimilikinya sehingga menciptakan suatu skill yang bahkan seseorang dengan penglihatan normal saja belum tentu dapat menguasainya. Seperti kemampuan bermusik dan memijat.

Di Indonesia terdapat sebuah organisasi bernama Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI). ITMI merupakan organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tunanetra agar produktif dan strategis. ITMI terbentuk dengan tujuan agar penyandang disabilitas tunanetra dapat mengembangkan kemampuan dan keahlian yang ada dalam dirinya. ITMI menghimpun masyarakat penyandang tunanetra khususnya yang beragama Islam untuk dibantu dan didampingi melakukan kegiatan keagamaan Islam seperti menghafal ayat suci, belajar membaca Al-Quran menggunakan braile, menulis ayat Al-Quran, mengadakan kajian, menggalang bantuan kepada anak yatim. Diluar kegiatan keagamaan ITMI juga mengajarkan para penyandang tunanetra teknik atau kemampuan untuk pijat (massage).

ITMI telah tersebar di berbagai kota di Indonesia seperti di Bandung, Palembang, Bogor, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Tangerang, Kabupaten Serang dan berbagai kota lainnya. ITMI yang berada di Kabupaten serang berdiri pada September 2021. Lokasinya berada di Desa Kadubeureum, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten serang Banten. Pembentukan ITMI Kabupaten Serang saat itu dihadiri beberapa tokoh seperti pimpinan

wilayah ITMI Banten, hingga anggota DPRD Kabupaten Serang dahil setempat. Surji, selaku ketua ITMI Kabupaten Serang mengatakan bahwa ITMI Kabupaten Serang memiliki tujuan yang sama dengan ITMI di daerah lainnya yaitu mengembangkan potensi diri dan membantu penyandang tunanetra muslim melakukan kegiatan sebagai umat Muslim.

Surji ditunjuk langsung oleh Ketua ITMI seIndonesia yang berada di Bandung untuk menjadi Ketua ITMI Kabupaten Serang Berdirinya ITMI Kabupaten Serang ternyata tidak bertahan lama. Surji selaku ketua ITMI Kabupaten Serang mengaku ditipu oleh seorang rekannya, perempuan dengan inisial N yang juga merupakan seseorang yang membantu ITMI Kabupaten Serang terbentuk. N yang posisinya sebagai pendamping Surji membawa kabur uang sejumlah 80 juta Rupiah milik ITMI Kabupaten Serang yang sebelumnya dianggarkan untuk membeli kubutuhan serta memenuhi fasilitas ITMI Kabupaten Serang seperti Pembangunan sekretariat, pengurusan perizinan, pembelian alat tulis, Al-Quran braile, dan lain-lain.

Dana organisasi yang dibawa kabur membuat aktivitas ITMI terhambat, ditambah dengan belum diresmikannya organisasi tersebut di pemerintahan membuat keberadaan ITMI Kabupaten Serang semakin tidak terlihat. Surji selaku Ketua ITMI Kabupaten Serang sebelumnya telah merencanakan pengajuan legalitas organisasi namun rencana tersebut belum terlaksana hingga kini karena trauma yang dialaminya akibat penipuan yang dilakukan oleh rekannya sendiri. Surji sendiri mengatakan bahwa beliau memiliki

relasi yang cukup luas dari berbagai kalangan yang siap membantunya mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan organisasi ITMI Kabupaten Serang.

Banyak bantuan ditawarkan namun Surji menolak semuanya karena rasa ketidakpercayaannya dan merasa bahwa bantuan tersebut hanyalah formalitas semata. Pada akhirnya tujuan ITMI Kabupaten Serang untuk memberdayakan penyandang disabilitas Muslim, mengembangkan Kemampuan individu, dan mengubah pandangan masyarakat terkait disabilitas tunanetra yang selalu lekat dengan anggapan tidak dapat melakukan apapun tidak dapat terlaksanakan. Upaya rekognisi yang sebelumnya direncanakan tidak berjalan. Tidak ada pengakuan yang muncul dari masyarakat terhadap ITMI Kabupaten Serang. Ketidakberdayaan untuk mengupayakan rekognisi menjadikan rekognisi bagi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang tersebut tidak berhasil dicapai.

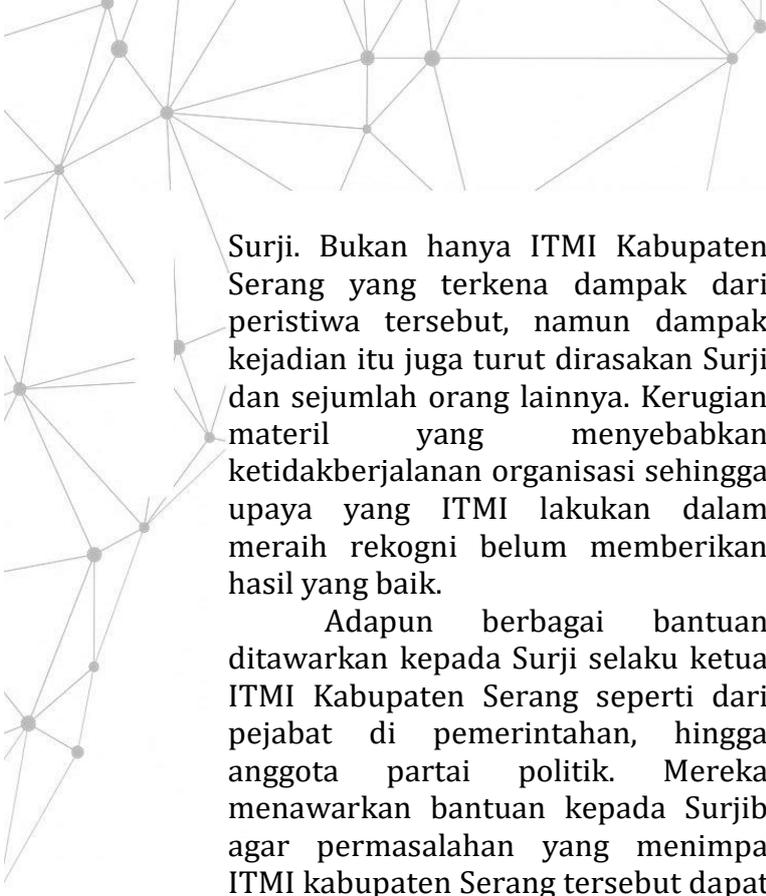
Upaya Rekognisi

ITMI pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya dari sebuah kelompok masyarakat di Indonesia dalam pemenuhan hak hak penyandang disabilitas tunanetra. 10 Pandangan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas yang tidak hanya tunanetra seringkali berupa stereotype buruk dan meremehkan, bahkan tidak jarang masyarakat menganggap bahwa penyandang disabilitas berbeda atau bahkan lebih rendah dari mereka hanya karena para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan. Responsibilitas masyarakat terhadap penyandang tunanetra menimbulkan berbagai kesulitan bagi penyandang tunanetra

karena reaksi berbeda masyarakat seperti melindungi secara berlebihan dan tatapan belas kasih yang membuat tidak nyaman.

Tidak tersedianya tempat, diskriminasi, hingga ketidakpedulian yang diberikan masyarakat kepada penyandang tunanetra menimbulkan keadaan frustrasi yang membuat penyandang tunanetra sulit melakukan penyesuaian social. Pandangan-pandangan tersebut membuat penyandang tunanetra sulit mengembangkan potensinya karena proses pembentukan citra diri yang tergores, hal tersebut menimbulkan rasa rendah diri, tidak pantas, tidak percaya diri, hingga perasaan tidak berharga tumbuh tanpa sadar dalam diri penyandang tunanetra. Organisasi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) mengupayakan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) khususnya ITMI Kabupaten Serang mengupayakan adanya sebuah pengakuan untuk organisasinya. Identitas ITMI sebagai organisasi penghimpun penyandang disabilitas tunanetra Muslim perlu dikonstruksikan secara dialogis melalui pengakuan.

Surji selaku Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang diutus langsung oleh ketua ITMI seIndonesia yang berada di Bandung mengaku telah mengupayakan bebrapa hal dalam mengurus legalitas organisasi ITMI. Namun berbagai kesulitan ditemui ketika mengupayakan pengakuan untuk ITMI Kabupaten Serang. Seperti rekan kerja Surji yang ternyata seorang penipu berhasil membawa dana milik ITMI Kabupaten Serang yang mana dalam dana tersebut terdapat sejumlah nominal yang berasal dari uang pribadi



Surji. Bukan hanya ITMI Kabupaten Serang yang terkena dampak dari peristiwa tersebut, namun dampak kejadian itu juga turut dirasakan Surji dan sejumlah orang lainnya. Kerugian materil yang menyebabkan ketidakberjalan organisasi sehingga upaya yang ITMI lakukan dalam meraih rekogni belum memberikan hasil yang baik.

Adapun berbagai bantuan ditawarkan kepada Surji selaku ketua ITMI Kabupaten Serang seperti dari pejabat di pemerintahan, hingga anggota partai politik. Mereka menawarkan bantuan kepada Surji agar permasalahan yang menimpa ITMI kabupaten Serang tersebut dapat terselesaikan. Namun Surji sendirilah yang tidak mempercayai orang-orang yang menawarkan bantuan padanya akibat rasa trauma yang muncul dalam dirinya setelah mengalami penipuan. Disamping hal itu untuk melakukan rekognisi dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta pemerintah, ITMI Kabupaten Serang memiliki hambatan lain. Surji selaku ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang merupakan seorang tunanetra. Surji memiliki kesulitan dalam mengupayakan rekognisi dan pengakuan untuk ITMI Kabupaten Serang.

“Iya karena engga ada pendampingnya yang buat bantu nulis-nulis kaya surat, proposal jadinya engga jalan (ITMI),” (Wawancara Surji, Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang pada 30 November 2023).

Karena keterbatasannya Surji tidak dapat melalukan pekerjaan yang bersifat administratif seperti membuat

proposal, mengetik surat, dan mengurus dokumen yang menjadi syarat pengajuan legalitas/pendaftaran organisasi ITMI di pemerintahan. Hal tersebut membuat upaya rekognisi ITMI Kabupaten Serang tidak tercapai dan menciptakan adanya misrekognisi.

ITMI Sebagai Organisasi Masyarakat Baru, Serta Pandangan Terhadapnya

Politik pengakuan erat kaitannya dengan hubungan antara perbedaan budaya dan identitas seseorang dalam pemenuhan hak dan kewarganegaraanya sebagai aktor politik dalam arena sosial, identitas tersebut dibawa berdasarkan sesuatu yang diperjuangkan dengan segala usahanya atau pemberian dari orang lain (*given*), pada sisi lain, politik pengakuan bisa muncul karena adanya segregasi identitas yang membuat ketidakadilan bersama dalam situasi individu dan kelompok yang termarginalkan dengan keadaan sosial sekitar, atas dasar ini, kelompok tersebut berupaya mencari tuntutan atas hak inklusifitas, terlebih dalam negara yang menganut system hukum dan demokrasi seperti indonesia, dengan cara membuat wadah social yang dapat menampung individu-individu lain yang memiliki kesamaan identitas dan hak perjuangan yang sama dalam rangka mencapai pemenuhan identitas yang substantif, (Taufik Poli, 2016).

Dari ketidakadanya pengakuan dan ketimpangan social akibat adanya mis-rekognisi membuat terjadinya tuntutan-tuntutan yang disuarakan oleh kelompok marjinal untuk diakui dan dipenuhi hak sosialnya, dalam konteks ITMI, ia hadir sebagai wadah bagi para penyandang disabilitas

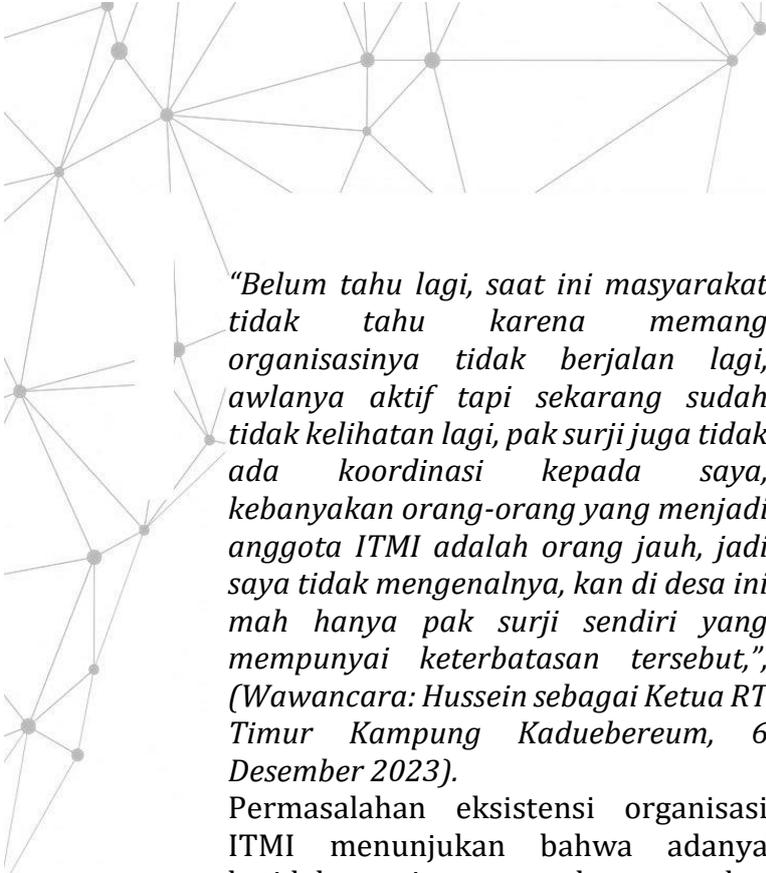
tunanetra yang berada diruang lingkup masyarakat, organisasi ini sendiri merupakan organisasi masyarakat cabang yang berada dibawah naungan ITMI Banten, menurut Ketua PW ITMI Banten, Muhammad Jaeni, menyatakan bahwa pembentukan ITMI Kabupaten Serang menjadi salah satu upaya dalam melakukan praktek dakwah dengan mempelajari Al- Qur'an serta sebagai alat pembentuk kemandirian bagi tunanetra yang berada di sekitar ataupun jauh berada disekitarnya, karena sedikitnya wadah inklusi bagi para penyandang disabilitas ini, ia menambahkan bahwa:

“Selain menghimpun masyarakat tunanetra, juga mengasah keahlian masing-masing individu, seperti saat ini sudah tercatat beberapa anggota ITMI Kabupaten Serang yang sudah menghafal Al-Qur'an mulai 4 juz sampai 30 juz, dengan hal tersebut, kami meminta agar Pemerintah Kabupaten Serang bisa melirik kami juga, tidak mudah bagi kami dapat dilihat oleh pemerintah, oleh karenanya, dengan wadah ini semoga dapat mempermudah koordinasi pemerintah dan mereka mau mendampingi kami,” (Wawancara berdasarkan BantenPost, Sabtu, 4 September 2021.)

Upaya rekognisi yang dilakukan oleh organisasi ITMI Kabupaten Serang nampaknya cukup terdengar pada masa awal pembentukan, pada saat itu, banyak pihak yang menemani dan merangkul organisasi ini sebagai bentuk kasih sayang dan keberpihakannya terhadap para disabilitas tunanetra di Kabupaten Serang, salah satunya adalah anggota DPRD Kabupaten Serang dapil setempat TB, Baenirzaman atau bisa

disebut sebagai Pak Beben turut ikut andil dalam rangka menemani dan sebagai pendamping utama berdirinya organisasi ini, kehadiran Pak Beben sebagai anggota legislatif memberikan semangat karena dirasa dukungannya cukup mempengaruhi keberadaan organisasi itu baik dimata masyarakat dan pemerintah, lebih lanjut, Anggota Komisi IV itu pun menegaskan siap menjadi jembatan bagi upaya penyampaian aspirasi organisasi ITMI agar terdengar sampai pimpinan Kabupaten Serang, karena sejatinya, pemenuhan hak dan keinginan warga negara adalah suatu kewajiban yang harus ditanggung oleh negara, terlebih kepada pembangunan yang ramah disabilitas agar para rintihan ketidaknyamanan yang dikumandangkan para tunanetra melalui ITMI ini bisa diubah, salah satunya bisa merasakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan warga negara lainnya.

Proses penyampaian hak dan tujuan yang berusaha dilakukan ITMI nampaknya memberikan kesadaran dan penglihatan baru dari pandangan Masyarakat sekitar, dengan adanya organisasi ini, masyarakat menjadi lebih terbuka dan peka terhadap isu yang dibawa oleh ITMI, dukungan warga sekitar terus diberikana kepada sesuatu yang bisa membawa kebermanfaatn, seperti organisasi ITMI salah satunya, namun, organisasi yang nampaknya aktif pada masa awal pembentukannya ini secara berkelanjutan tidak lagi menunjukkan existensinya yang dianggap sebagai representasi kaum minoritas, tahun demi tahun berlalu dan masyarakat sekaan mulai lupa dengan keberadaan organisasi sebagai wadah aspirasi tunanetra tersebut, berdasarkan keterangannya:



"Belum tahu lagi, saat ini masyarakat tidak tahu karena memang organisasinya tidak berjalan lagi, awlanya aktif tapi sekarang sudah tidak kelihatan lagi, pak surji juga tidak ada koordinasi kepada saya, kebanyakan orang-orang yang menjadi anggota ITMI adalah orang jauh, jadi saya tidak mengenalnya, kan di desa ini mah hanya pak surji sendiri yang mempunyai keterbatasan tersebut," (Wawancara: Hussein sebagai Ketua RT Timur Kampung Kaduebereum, 6 Desember 2023).

Permasalahan eksistensi organisasi ITMI menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian pemahaman dan keterbukaan antara pihak organisasi dan Masyarakat sekitar, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Masyarakat sudah memberikan dukungan dan pengakuannya, namun tak jarang reaksi yang dimunculkan oleh kelompok minoritas membuat Batasan-batasan eksklusi kerap terjadi, situasi ini distimulasi oleh anggapan bahwa Masyarakat hanya mendukung saja namun tidak bereaksi secara langsung dalam hal membantu apa yang menjadi permasalahan dan halangan rintangan Organisasi ITMI, yaitu pendampingan, perlu diketahui bahwa upaya yang dilakukan kaum disabilitas membutuhkan yang disebut pendampingan, pendampingan ini merupakan bentuk support secara aktivitas langsung dimana para tunanetra tidak bisa melakukan kegiatan kesehariannya seorang diri.

Mereka membutuhkan figure bantuan, contohnya seperti seseorang yang bisa menerjemahkan pikiran dan perkataan kaum tunanetra kedalam ketikan agar tercipta proposal pengajuan dan surat keluhan terhadap pemerintah, hal ini yang tidak

dikomunikasikan secara lebih mendalam antara kedua belah pihak, Di sisi lain, fenomena ini diperjelas dengan tidak adanya komunikasi yang terjalin antara pihak Organisasi ITMI dengan Pihak pemerintah terkait, kurangnya artikulasi yang seharusnya disampaikan oleh ITMI membuat banyak ketidaksesuaian atas pemenuhan identitas disabilitas, jika kita lihat dari sudut pandang ITMI, ia berharap pemerintah menyodorkan bantuan serta penglihatan terhadap organisasi yang sedang mengalami keadaan mis-rekognisi ini, ketidakadanya pengakuan yang diberikan oleh pihak sekitar membuat ITMI menjadi kesusahan.

Oleh karena itu, kesusahan yang semakin lama itulah yang membuat organisasi tersebut menjadi tidak aktif lagi, sedangkan dari sudut pandang pemerintah, bentuk penyelesaian kondisi ini bisa dilaksanakan apabila terdapat kejelasan atas komunikasi yang diberikan ITMI, namun dalam realitanya, organisasi tersebut tidak mampu mengartikulasikan kepentingannya karena keterbatasan yang dimilikinya. Hal inilah yang terus menjadi dasar atas perjuangan pengakuan yang dilakukan oleh ITMI sebagai wadah bagi penyandang tunanetra.

Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dalam Perspektif Organisasi Lain

Persatuan Tunanetra Muslim Indonesia merupakan salah satu organisasi aktif tingkat nasional yang menghimpun disabilitas netra dengan cakupan mitra dari organisasi ini tersebar di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Banten. Di Provinsi Banten sendiri, organisasi yang akrab dikenal dengan sebutan Pertuni ini terhimpun di Kota

Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, serta Kabupaten Lebak. Persatuan Tunanetra Indonesia mitra Kota Serang sangat aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan masyarakat, sehingga organisasi yang kerap dikenal dengan sebutan Pertuni, menjalin kedekatan hubungan dengan baik bersama para mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Serang.

Selaku organisasi yang aktif dalam berbagai kegiatan dan terhubung bersama banyak elemen masyarakat hingga pemerintah, sejak awal pembentukan organisasi Pertuni Kota Serang memiliki struktur organisasi dan hierarki penugasan yang jelas. Saat ini estafet kepemimpinan Pertuni Kota Serang sedang dipegang oleh Bapak Jumri, penyandang disabilitas netra yang berkompentensi tinggi ditengah keterbatasannya. Sama-sama bertempat di Serang, Persatuan Tunanetra Indonesia Mitra Kota Serang memberikan pernyataan bahwa pihaknya mengetahui Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Cabang Kabupaten Serang sebagai sebuah organisasi yang juga menghimpun disabilitas netra, namun pihaknya mengutarakan bahwa organisasi tersebut telah lama tidak aktif dan berkegiatan layaknya organisasi pada umumnya.

Bapak Surji, selaku Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Mitra Kota Serang menuturkan: *"Ya, kami tahu soal ITMI di Kabupaten Serang tetapi sepengetahuan kami organisasi sudah lama gak aktif,"*. Pertuni dan ITMI memang memiliki perbedaan orientasi dalam melakukan aktivitas organisasi masing-masing, ITMI selaras dengan penamaannya yang

membawa identitas agama Muslim cenderung berorientasi pada kegiatan sosial-agama Islam yang dalam hal ini merujuk pada kegiatan berdakwah dan melakukan pengajian menggunakan Qur'an Braille, sementara itu Pertuni bergerak dalam bidang sosial masyarakat yang lebih meluas dan tidak terpaku pada kegiatan keagamaan Hal tersebut kembali diutarakan oleh Bapak Jumri selaku Ketua Pertuni Kota Serang:

"Kalo untuk perbedaannya, ITMI itu banyak bergerak di bidang keagamaan Islam seperti pengajian bersama, dakwah dan semacamnya, sedangkan kegiatan Pertuni baik sosial, masyarakat, agama dan kegiatan lainnya kami masuk".

Namun meskipun terdapat perbedaan orientasi, dalam pandangan Bapak Jumri selaku ketua Pertuni Kota Serang, ITMI memang telah lama tidak melakukan pergerakan sehingga perbedaan orientasi bukanlah alasan mengapa ITMI tidak melakukan pergerakan. Berdasarkan perspektif Persatuan Tunanetra Indonesia Mitra Kota Serang, tidak Bergeraknya ITMI sebagai sebuah organisasi memerlukan peninjauan kembali terhadap apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam organisasi. Lebih lanjut, dalam penuturan Pertuni, di awal pembentukan ITMI menjadi sebuah organisasi tidak ada yang mengetahui bagaimana mekanisme memilih dan menetapkan ketua yang akan memimpin organisasi ITMI, sehingga hal tersebut seolah mengindikasikan terdapatnya segelintir orang atau oknum yang memanfaatkan keadaan disabilitas netra untuk keuntungan pribadi

dengan membentuknya sebagai organisasi.

Berbeda halnya pada awal pembentukan Pertuni menjadi organisasi, pemilihan ketua dilakukan di awal dan secara terbuka, hal ini dilangsungkan guna memudahkan koordinasi antar anggota dan kerjasama organisasi ke depannya. Bagi Pertuni kejelasan dalam struktur organisasi sangat diperlukan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan hal tersebut tidak terjadi pada ITMI.

Bicara mengenai oknum ataupun segelintir orang yang memanfaatkan keberadaan ITMI, dari Pertuni sendiri mengungkapkan hampir tergelincir dalam lubang yang sama dengan ITMI. Memang di sekitar mereka terdapat oknum yang berniat memanfaatkan keberadaan disabilitas netra demi mengambil keuntungan pribadi semata, oknum tersebut menebar jaringjaring perangkapnya dengan mencari massa yang dalam hal ini adalah tunanetra, mengumpulkannya, kemudian melakukan diskusi serta mengiming-imingi para netra mengenai keuntungan-keuntungan ataupun kemudahan-kemudahan yang akan didapat lainnya melalui kemampuannya dalam berbicara yang membuat seseorang mudah terpengaruh. Dalam konteks ini, Pertuni merujuk pada ITMI yang menjadi korban dari oknum tersebut.

“Sebelum ITMI, dulu Pertuni Kabupaten sempat menjadi korban. Oknum yang melakukan itu memang banyak dapat informasi dari kami, beliau tanya mengenai bagaimana cara mengajukan proposal bantuan ke dinas-dinas, menanyakan tentang anggota-anggota

Pertuni kepada kami, kemudian juga warga penyandang tunanetra. Banyak yang hampir kena modus beliau, Pertuni Kabupaten Lebak pun pernah. Kedatangan dia kepada kami pun hampir bikin kami terjerumus tapi syukur kami tidak terpengaruh oleh beliau. Qadarullah masih dilindungi”.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka selanjutnya dapat dirumuskan bagaimana pandangan Pertuni Mitra Serang terhadap ITMI Kabupaten Serang, yakni Pertuni memandang ITMI selayaknya organisasi yang sama-sama menghimpun dan terdiri atas disabilitas netra dengan sedikit terdapatnya perbedaan corak atau orientasi dari organisasi mereka. Adapun, Pertuni sangat menyayangkan ITMI yang tidak dapat melakukan pergerakan karena telah terjerumus ke dalam hal yang tidak mengenakan sebelumnya.

Pertuni berpendapat bahwa ITMI sebetulnya merupakan organisasi yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan kemandirian bagi disabilitas netra, terlebih lagi ITMI bergerak di Kabupaten Serang, sehingga dapat merangkul disabilitas netra lainnya yang mungkin tidak memiliki akses atau tidak dapat tergabung ke dalam Pertuni yang berada di Kota Serang sehingga seharusnya dapat menjadi organisasi yang aktif dan bergerak maju ke depan. Perihal rekognisi sebagai dimensi integral dalam diri manusia, dapat dilihat bahwasanya Pertuni selaku organisasi yang terpisah dengan ITMI memberikan pengakuan atas ITMI yang terdiri atas sesama disabilitas netra.

Massa tunanetra yang sengaja dikumpulkan, kemudian dihimpun menjadi sebuah organisasi, dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi merupakan tindakan yang sangat bersifat diskriminatif. Fakta bahwa Pertuni hampir terjatuh dalam modus operandi yang dijalankan oleh oknum yang sama menunjukkan bagaimana identitas ITMI dan Pertuni sebagai disabilitas netra tidak mendapat penghormatan. Meski hampir terjatuh dalam lubang yang sama Pertuni berhasil mendapatkan rekognisi atas organisasinya dari mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah, didorong oleh keinginan pihaknya untuk terus berkembang walaupun dengan perbedaan dan keterbatasan yang dimiliki. Namun, Pertuni pun tidak dapat mengupayakan rekognisi tersebut untuk turut dirasakan oleh ITMI, pasalnya bagi pihak mereka tentu hal ini menyangkut keinginan dan semangat yang harus datang dari dalam ITMI sendiri.

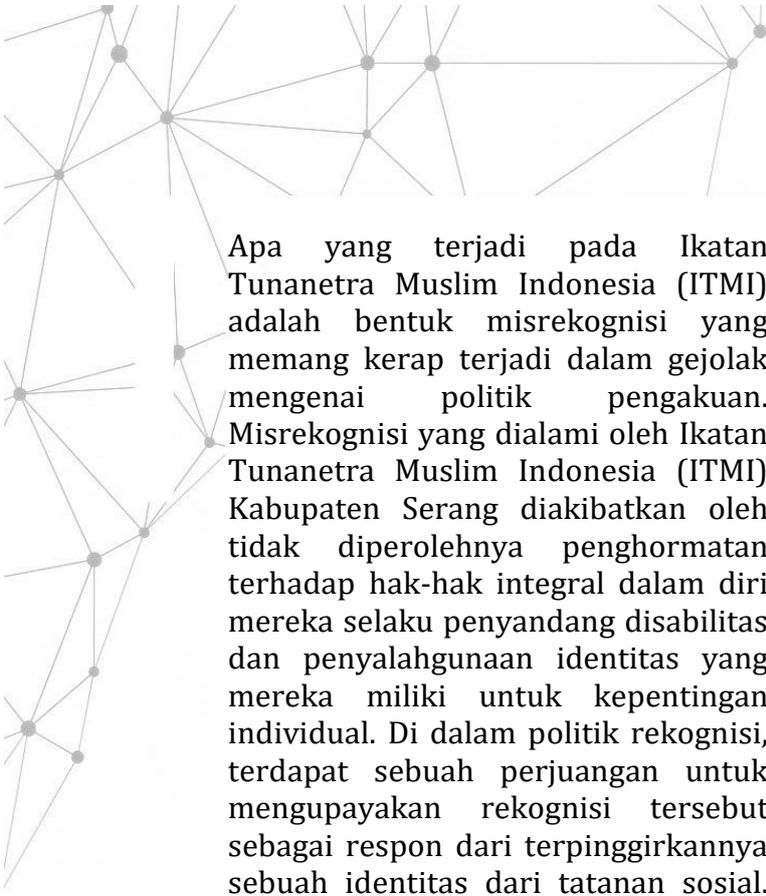
Kegagalan Rekognisi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Serang

Produktivitas kelompok disabilitas mesti disalurkan ke dalam kegiatan yang bermanfaat, hal tersebut bertujuan agar disabilitas turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya pemberdayaan terhadap disabilitas. Memberdayakan disabilitas maksudnya adalah membentuk identitas mereka melalui pengembangan potensi yang dimilikinya, melakukan pengajaran guna merubah perilakunya, serta memberi mereka hak untuk dihormati (Dynaindar & Priyono, 2022). Ikatan

Tunanetra Muslim Indonesia Mitra Kabupaten Serang mulanya menjadi sebuah harapan bagi kelompok disabilitas netra di Kabupaten Serang sebagai sebuah ruang untuk menciptakan kemandirian dan meraih rekognisi berupa hak-hak untuk dihormati bagi mereka selaku penyandang disabilitas dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Namun, harapan ITMI yang terbentuk atas nama organisasi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan. Upaya melepaskan diri dari diskriminasi dan keinginan untuk menciptakan kemandirian melalui pengakuan atas hak-hak mereka untuk dihormati gagal didapatkan oleh ITMI Kabupaten Serang akibat diskriminasi yang organisasi ini peroleh sebelumnya. Meninjau dari minimnya ketidaktahuan masyarakat dan pemerintah mengenai Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang, hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya pergerakan apapun yang dilakukan oleh ITMI. Diskriminasi yang didapatkan oleh ITMI pada awal berdirinya ITMI sebagai organisasi menjadi penyebab utama mengapa ITMI tidak lagi aktif. Lebih spesifik, jika mengacu pada Ketua ITMI selaku pimpinan organisasi, keengganan ITMI untuk melakukan pergerakan disebabkan oleh faktor kekhawatiran akan terulangnya diskriminasi yang sama, ketakutan untuk menaruh kepercayaan terhadap orang lain, serta ketidakhadiran seseorang yang mumpuni untuk betul-betul memberikan pendampingan.

Ketidakterdayaan untuk mengupayakan rekognisi menjadikan rekognisi bagi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang tersebut tidak berhasil dicapai.



Apa yang terjadi pada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) adalah bentuk misrekognisi yang memang kerap terjadi dalam gejolak mengenai politik pengakuan. Misrekognisi yang dialami oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang diakibatkan oleh tidak diperolehnya penghormatan terhadap hak-hak integral dalam diri mereka selaku penyandang disabilitas dan penyalahgunaan identitas yang mereka miliki untuk kepentingan individual. Di dalam politik rekognisi, terdapat sebuah perjuangan untuk mengupayakan rekognisi tersebut sebagai respon dari terpinggirkannya sebuah identitas dari tatanan sosial. Kegagalan dalam mendapatkan pengakuan atau dalam konteks kali ini adalah mis-rekognisi dapat menjadikan kelompok minoritas semakin terpinggirkan, atau dalam beberapa kasus di Indonesia gerakan politik yang dilangsungkan oleh kelompok yang gagal mendapat rekognisi tidak dianggap sebagai bagian dari gerakan politik yang diakui (Poli, 2022).

Honneth memberikan penjelasan bahwasanya Identitas memerlukan adanya pertukaran pengakuan (mutual recognition) manusia memerlukan pengakuan dan perlu untuk mengakui identitas orang lain. Sebaliknya, tidak adanya mutual recognition akan mengundang patologi sosial untuk masuk ke dalamnya, hal ini seperti tindakan kekerasan, ketimpangan, pengabaian atas hak-hak sosial, distorsi, termasuk mis-rekognisi (Meitikasari, 2021). Sebelum beralih pada kegagalan rekognisi dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) mula-mula, akan dibahas ITMI beserta bentuk

rekognisi, yang diantaranya: cinta, hukum, dan solidaritas.

1. Cinta Cinta

Merujuk pada relasi dan kedekatan emosional yang terjalin kuat, relasi dalam cinta tidak hanya mencakup cinta dalam konteks hubungan dua orang individu yang menjalin kasih, namun hal tersebut juga dapat terwujud dalam hubungan persahabatan yang tulus maupun hubungan kedekatan antara orangtua dan anak. Menurut Honneth, dimensi cinta merupakan bentuk perwujudan mutual recognition yang kemudian membentuk self confidence antar individu yang terlibat didalamnya. ITMI Kabupaten Serang dalam relasi cinta, memiliki hubungan persahabatan yang baik dan berhasil mewujudkan sebuah pertukaran pengakuan identitas.

Pada awal berdirinya ITMI sebagai organisasi, antar sesama anggota ITMI memiliki kesamaan tujuan dan semangat untuk memajukan bersama organisasi ITMI, namun dana organisasi yang dilarikan menjadikan ITMI pada saat itu memiliki keterbatasan untuk melakukan pergerakan.

2. Hukum

Perwujudan rekognisi berikutnya adalah hukum, hukum mengacu pada pengakuan terhadap hak universal yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum, dan nilai-nilai universal yang terdapat dalam diri manusia. Hukum juga merupakan bentuk nyata dari mutual recognition yakni pengakuan terhadap hak-hak universal yang dimiliki oleh manusia. Dilihat berdasarkan dimensi Hukum, ITMI Kabupaten Serang tidak pernah mendapatkan permasalahan atau

kegagalan rekognisi dalam hal hak universal manusia sebagai subjek dari hukum.

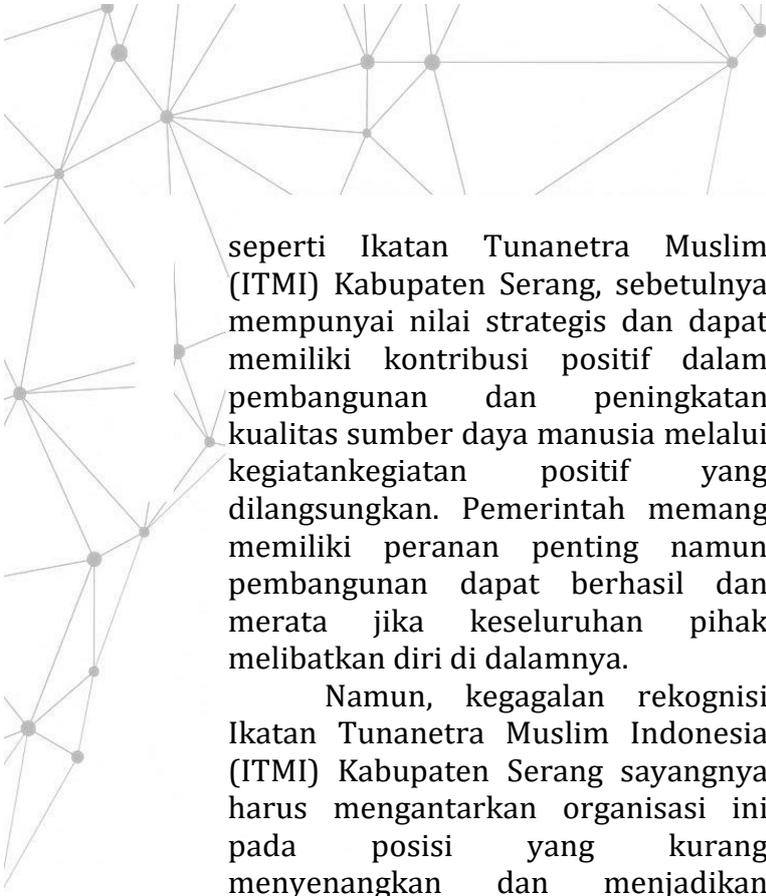
3. Solidaritas

Solidaritas mencakup lebih luas dari aspek cinta, dan hukum, jika cinta merujuk pada aspek relasi emosional yang kuat, dan hukum mengacu pada penghormatan atas hak-hak universal manusia, maka solidaritas merupakan penghargaan serta penghormatan atas perbedaan yang dimiliki orang lain. Hal ini mencakup ruang yang lebih luas, yakni memberikan pengakuan atas "the other" dengan segala perbedaannya, lebih mudahnya cara memahami solidaritas adalah memberikan pengakuan terhadap orang lain bukan hanya karena orang tersebut memiliki hak untuk itu, namun juga menghargai ragam dan perbedaannya. Jika meninjau dari dimensi solidaritas, ITMI Kabupaten Serang mengalami kegagalan dalam mendapat penghormatan atas perbedaan yang mereka miliki sebagai kaum disabilitas netra yang terhimpun menjadi sebuah organisasi.

Berdasarkan dimensi-dimensi rekognisi tersebut Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang mengalami kegagalan rekognisi dalam bentuk Solidaritas. Kegagalan rekognisi dalam dimensi Solidaritas dapat menimbulkan bentuk ketidakhormatan yang menghancurkan martabat manusia, seperti penindasan, pengabaian, dan marginalisasi identitas tertentu. Sehingga, mis-rekognisi merupakan sebuah bentuk pencideraan terhadap keadilan, penghambat kesetaraan, dan bahkan termasuk ke dalam penghinaan manusia (Honneth; Meitikasari, 2021).

Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang mengalami kegagalan rekognisi dalam bentuk penghancuran martabat manusia. Hal tersebut dikarenakan, Identitas kelompok mereka sebagai penyandang disabilitas netra dimobilisasi demi keuntungan materiil semata yang mana hal tersebut jelas merupakan tindakan tidak diskriminatif dan tidak bermoral yang menghancurkan serta mengabaikan martabat (self-respect) keanggotaan ITMI. Mis-rekognisi yang terjadi pada ITMI merupakan bentuk pencideraan terhadap keadilan, yakni tidak terciptanya keadilan dalam kelompok ITMI, ketidakadilan tersebut kemudian turut menjadi penghambat dalam membentuk kesetaraan.

Apa yang dimaksud kesetaraan di sini adalah keberadaan disabilitas yang sama dan setara di mata sosial, baik masyarakat maupun pemerintah. Selama ini aksesibilitas untuk pemenuhan hak disabilitas belum sesuai dengan apa yang diharapkan, begitupun halnya dengan Provinsi Banten, anggaran yang digelontorkan belum mampu untuk menunjang keseluruhan kebutuhan bagi disabilitas. Pemahaman masyarakat mengenai kebutuhan disabilitas pun masih minim, guiding block yang sengaja dirancang guna memberi kemudahan bagi disabilitas netra saat berjalan di trotoar justru banyak digunakan untuk lahan berdagang. Kegagalan rekognisi pada ITMI juga termasuk dalam bentuk penghinaan manusia, seolah-olah keterbatasan yang dimiliki sebagai seorang penyandang disabilitas netra merupakan sebuah bentuk legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang kepada mereka. Keberadaan kelompok-kelompok disabilitas



seperti Ikatan Tunanetra Muslim (ITMI) Kabupaten Serang, sebetulnya mempunyai nilai strategis dan dapat memiliki kontribusi positif dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatankegiatan positif yang dilangsungkan. Pemerintah memang memiliki peranan penting namun pembangunan dapat berhasil dan merata jika keseluruhan pihak melibatkan diri di dalamnya.

Namun, kegagalan rekognisi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang sayangnya harus mengantarkan organisasi ini pada posisi yang kurang menyenangkan dan menjadikan keberadaan mereka hanya sebatas nama. Dengan demikian, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang gagal mengupayakan rekognisi atas organisasinya, yang dalam hal ini kegagalan rekognisi ITMI Kabupaten Serang berada dalam bentuk solidaritas yang menghancurkan martabat individualitas dan keanggotaan mereka sebagai penyandang tunanetra. Mis-rekognisi yang dialami oleh Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang membuat 18 keberadaan mereka minim diketahui dan terlihat dalam tatanan sosial masyarakat sekitar, organisasi, serta pemerintah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, maka kesimpulan dan point-point terakhir yang ingin penulis sampaikan adalah, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Mitra Kabupaten Serang merupakan organisasi yang mulanya terhimpun guna mengembangkan keterampilan serta kemandirian penyandang disabilitas

netra. Dengan bercorak muslim, ITMI berorientasi pada kegiatan dan pengembangan kemandirian dalam nilai-nilai keagamaan Islam. Ketua dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kabupaten Serang awalnya berharap ITMI dapat menjadi ruang pergerakan dan sarana mendapatkan rekognisi bagi penyandang disabilitas netra. Namun, diskriminasi melalui mobilisasi penggunaan identitas disabilitas netra yang mereka dapatkan di awal terbentuknya Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Mitra Kabupaten Serang sebagai organisasi telah menghancurkan martabat kemanusiaan pihaknya.

Diskriminasi yang menghancurkan martabat kemanusiaan ITMI selaku penyandang disabilitas netra menjadikan organisasinya berhenti di tengah-tengah dan memilih untuk tidak melakukan pergerakan apapun hingga saat ini, sehingga keberadaan ITMI di Kabupaten Serang sangat minim diketahui oleh masyarakat banyak, termasuk pemerintah. Apa yang terjadi pada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Mitra Kabupaten Serang jika merujuk pada teori milik Axel Honneth mengenai rekognisi, merupakan mis-rekognisi dalam level Solidaritas yang menyebabkan kehancuran terhadap harkat integral kemanusiaan. Solidaritas dalam teorinya dijelaskan sebagai bentuk pengakuan terhadap perbedaan yang melekat dalam diri seorang individu, pada konteks ini ITMI Kabupaten Serang dengan identitasnya sebagai penyandang disabilitas netra tidak mendapatkan pengakuan dalam ranah solidaritas sebab perbedaan identitas yang pihaknya miliki justru mendapat diskriminasi dari oknum tidak bertanggungjawab.

Mis-rekognisi yang terjadi pada ITMI Kabupaten Serang diakibatkan oleh faktor-faktor yang saling keterhubungan diantaranya: (1) Identitas mereka sebagai penyandang disabilitas digunakan untuk mendulang keuntungan pribadi, hal tersebut merupakan tindakan diskriminatif, (2) Tindakan diskriminatif tersebut merupakan bentuk nyata atas tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak mereka selaku penyandang disabilitas, (3) Diskriminasi yang menghancurkan martabat kemanusiaan anggota dan individual ITMI Kabupaten Serang membuat pihaknya merasa kecewa, takut dan khawatir untuk kembali bergerak (4) Keterbatasan disertai ketakutan mereka untuk kembali bergerak menjadikan rekognisi yang awalnya ingin diupayakan melalui ITMI tidak dapat dicapai.

Diperlukan adanya keberpihakan dari pemerintah untuk memberdayakan komunitas difabel, misalnya penguatan *soft skill*, pemberian program wirausaha, dan penguatan kapasitas organisasi melalui regulasi yang lebih implementatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamida, N. S., & Mustofa, T. A. (2023). Peran Guru PAI dalam Pendidikan Al-Qur'an pada Penyandang Disabilitas Tunanetra. *Journal on Education*, 6(1), 6379-6388.
- Mambela, S. (2018). Tinjauan umum masalah psikologis dan masalah sosial individu penyandang tunanetra. *Buana Pendidikan: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipa Surabaya*, 14(25), 65-73.
- Pomulu, S. E. P. (2022). Strategi Dakwah Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Sulawesi Utara pada Pengembangan Potensi Diri Tunanetra Muslim di Manado. *Ahsan: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 1(1), 19-37.
- Romadhon, P. (2021). Kembangkan Kemandirian dan Dakwah, ITMI Kabupaten Serang Dibentuk. *Bantenpos.co*. Link URL: <https://banpos.co/2021/09/04/kembangkan-kemandirian-dandakwah-itmi-kabupaten-serang-dibentuk/2/>(Diakses pada 14 Desember 2023)
- Meitikasari, D., & Drianus, O. (2021). Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama. *Jaqqi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 6(1), 24-47.
- Dynaindar, I. J., & Priyono, N. (2022). Sriwedari Menjadi Desa Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Usaha Penanaman Pohon, Konservasi Penguatan Tebing dan Penghijauan Dalam Peningkatan Produktivitas. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 2(3), 17-26.
- Poli, M. T. BERJUANG MELAWAN MIS-REKOGNISI, MAL-DISTRIBUSI, DAN MISREPRESENTASI: POLITIK KEWARGAAN PETANI PENGGARAP MENGHADAPI EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT DI LOLAK, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.
- Fadhillah, F. R. (2018). *PSYCHOLOGICAL WELL-BEING PADA MUSLIM PENYANDANG*.
- Hamidah, C. N. (2017). *PENGARUH STEREOTIP GENDER TERHADAP PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT*

(ANGGOTA DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA KOTA YOGYAKARTA.

Hayati, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM MENEKAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KOTA SERANG.

Humaidi. (2022). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Atas Rekognisi Penghayat Kepercayaan Dalam Konstes Politik Kewarganegaraan.

Idrus, M. (2022). INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN. Jurnal Agama dan Kebudayaan.

Kristiandy, F. (2021). ANALISIS KESEJAHTERAAN HAK PENYANDANG DISABILITAS: SITUASI, KONDISI, PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENYANDANG DISABILITAS DI LINGKUNGAN SEKITAR DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN. WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM.

Lestari, A. (2022). Politik Rekognisi Sebagai Penyelesaian Konflik Agama Di Dalam Masyarakat Multikulturalan (Studi Kasus Di Kabupaten Bantul). Jurnal Adhikari, 204- 220.

Maneger Nasution, B. M. (2022). PERSEPSI REKOGNISI HAK-HAK SIPIL SISWA SMA DI DKI JAKARTA. Jurnal Pendidikan Islam dan Multikulturalisme. PENGARUH STEREOTIP GENDER TERHADAP PARTISIPASI

PENYANDANG DISABILITAS NETRA DI LINGKUNGAN KELUARGA DAN MASYARAKAT (ANGGOTA DEWAN PIMPINAN DAERAH IKATAN TUNANETRA MUSLIM INDONESIA KOTA YOGYAKARTA).

Syafi'ie1, M. (2014). PEMENUHAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS. INKLUSI. Yulaswati, V. N. (n.d.). injauan Peningkatan Akses Dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi Dan Yuridis.

Maulani, R. S., Widyastuti, Y., & Godjali, M. R. (2018). Pengawasan Ketenagakerjaan di Wilayah Serang I dalam Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Serang. <http://eprints.untirta.ac.id/960>

Prabowo, R. A. (2019). Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan Kesetaraan dalam Hukum di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 4(2), 75. <https://doi.org/10.14710/jiip.v4i2.5379>

Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta.

EMANANDA, M. M. (2023). REPRESENTASI DISKRIMINASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM FILM MIRACLE IN CELL NO 7 (VERSI INDONESIA).